



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 53 TAHUN 2022**

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023;
 - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2023.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Dinas Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Dinas Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II**SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN****Pasal 2**

Renja Dinas Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Dinas tahun lalu.

Pasal 3

- (1) Renja Dinas Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS TAHUN LALU
 - BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS
 - BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS
 - BAB V : PENUTUP
- (2) Renja Dinas Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Dinas Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Dinas Tahun Anggaran 2023.

BAB III**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022
B U P A T I G A R U T,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT

TAHUN 2022 NOMOR 53

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 53 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut sehingga Dinas Lingkungan Hidup berkewajiban memiliki Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran, sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Didalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 disusun dengan berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
-

Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024, yang ditetapkan dengan tujuan memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen Dinas Lingkungan Hidup dengan menyajikan rumusan prioritas program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan sumber dana.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dituangkan secara teknis administratif dalam kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS), serta sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAB V : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan serta mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra disajikan dalam Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN
PENCAPAIAN RENSTRA DLH S/D TAHUN 2022 (TAHUN BERJALAN)
KABUPATEN GARUT

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLH) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja DLH Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLH s/d tahun 2024			
							Target Renja DLH Tahun 2022	Realisasi Renja DLH Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4		5		6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2.11.01	I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Presentase pemenuhan pelayanan administrasi	100	%	100	%	100	%	50	50	100	%	50	100%
2.01.01.2.01	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	30	Dokumen			7	Dokumen	3 dokumen, 1 draft dokumen	50,00	7	Dokumen	50,00	75%
2.11.01.2.01	1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	6	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1 Draf Dokumen	80,00	1	Dokumen	80,00	90%

2.11.0 1.2.01 .06	1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja	20	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	3 Dokumen	60,00	5	Dokumen	60,00	70%
2.11.0 1.2.01 .07	1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen		0	1	Dokumen	0	50%
2.11.0 1.2.02	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	13	Dokumen			267	ASN	2 draft dokumen	50,00	267	ASN	50,00	100%
2.11.0 1.2.02 .01	2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	4 281	Dokumen ASN	281	ASN	267	Orang	267 Orang	50,00	267	Orang	50,00	85%
2.11.0 1.2.03 .02	2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	3	Dokumen			1	Dokumen	1 draft dokumen	50,00	1	Dokumen	50,00	85%
2.11.0 1.2.03	3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah	10	Dokumen					1 draft dokumen	50,00			50,00	75%
2.11.0 1.2.03 .02	3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah penyediaan tenaga jasa keamanan	5	Orang	5	Orang	5	Orang	5 orang	50,00	5	Orang	50,00	80%

2.11.0 1.2.05	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	7	Dokumen					1 dokumen	100,00			100,00	100%
2.11.0 1.2.05 .02	4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian kerja lapangan yang disediakan	326	Stel	348	Stel	180	Stel	180 stel	100,00	180	Stel	100,00	100%
2.11.0 1.2.06	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum	4	Dokumen					1 draft dokumen	40,00			40,00	60%
2.11.0 1.2.06 .01	5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis dokumen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor yang tersedia			9	Jenis Komponen	9	Jenis Komponen	6 jenis komponen	60,00	9	Jenis Komponen	60,00	65%
2.11.0 1.2.06 .02	5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sarana perkantoran yang tersedia			58	Jenis ATK	58	Jenis ATK	58 jenis atk	46,40	58	Jenis ATK	46,40	55%
2.11.0 1.2.06 .05	5.3	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia			14	Jenis Cetakan	14	Jenis Cetakan	14 jenis cetakan	52,62	14	Jenis Cetakan	52,62	58%
2.11.0 1.2.06 .06	5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan			6	Jenis Koran	6	Jenis Koran	6 jenis koran	49,98	6	Jenis Koran	49,98	57%

2.11.0 1.2.06 .08	5.5	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah jamuan makanan dan minuman yang disediakan			2524	Per Orang	2600	Per Orang	1300 Perorang	45,70	2600	Per Orang	45,70	50%
2.11.0 1.2.06 .09	5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi luar daerah yang dilaksanakan			12	Bulan	12	Bulan	6 bulan	10,95	12	Bulan	10,95	50%
2.11.0 1.2.07	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	Dokumen					1 draft dokumen	74,80			74,80	80%
2.11.0 1.2.07 .06	6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia	15 1	2 1			3	Jenis Jasa	1 jenis	74,80	3	Jenis Jasa	74,80	80%
2.11.0 1.2.08	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	Dokumen					1 draft dokumen	50,00			50,00	60%
2.11. 01.2. 08.02	7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa yang disediakan	3	Jenis	3	Jenis Jasa	3	Jenis Jasa	3 Jenis Jasa	50,00	3	Jenis Jasa	50,00	60%
2.11. 01.2. 08.04	7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa kebersihan kantor yang tersedia	4	Orang	3	Orang	3	Orang	3 orang	50,00	3	Orang	50,00	60%

2.11.01.2.09	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	Dokumen					1 draft dokumen	42,79			42,79	55%
2.11.01.2.09.01	8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	8 14	Mobil Motor	12	Unit	8 14	Unit Mobil Unit Motor	4 unit mobil 7 unit motor	50,00	8 14	Unit Mobil Unit Motor	50,00	60%
2.11.02	II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen lingkungan yang dievaluasi	100	%			100	%		0,77	100	%	0,77	50%
2.11.02.2.01	1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH	7	Dokumen			2	Dokumen		2,02	2	Dokumen	2,02	50%
2.11.02.2.01.01	1.1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen infirmasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah dan kajian akademis RPPLH yang disusun	4	Dokumen DIKPLHD	1	Dokumen	2	Dokumen	proses pelaksanaan	2,02	2	Dokumen	2,02	50%
2.11.02.2.02	2	Penyelenggara Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS yang disusun	26	Dokumen KLHS RDTR			6	Dokumen		0,57	6	Dokumen	0,57	50%

2.11.02.2.02.01	2.1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS yang disusun	24	Dokumen KLHS RDTR	2	Dokumen	6	Dokumen	proses pelaksanaan	0,57	6	Dokumen	0,57	50%
2.11.03	III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualiatas Lingkungan Hidup	62,31	Point			59,18	Poin			59,18	Poin		50%
2.11.03.2.01	1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	4	Dokumen			59,18	Poin	3 draft dokumen	50,00	59,18	Poin	50,00	55%
2.11.03.2.01.01	1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah pengujian karakteristik air limbah industri			6	Unit	16	kali	0	2,38	16	kali	2,38	52%
			Jumlah Dokumen Kajian Kualitas Udara	4	Kawasan			1	Dok	0		1	Dok		
			Jumlah Dokumen Kajian Kualitas Air					1	Dok	1 draft dokumen		1	Dok		
2.11.03.2.01.02	1.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Lokasi Kampung Iklim	20	Lokasi	1	Dokumen	5	Lokasi	5	33,49	5	Lokasi	33,49	56%

			Persediaan Alat Biogas	4	Dokumen	4	Lokasi	2	Lokasi	0		2	Lokasi		
2.11.03.2.01.03	1.3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Parameter Pengujian Yang terakreditasi	19	Parameter			2	parameter pengujian	2	55,08	2	parameter pengujian	55,08	60%
2.11.03.2.02	2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	9	Dokumen			59,18	Poin	0,00	0,00	59,18	Poin	0,00	60%
2.11.03.2.02.01	2.1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah dokumen Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat					1	Dokumen	0	0	1	Dokumen	0	60%
2.11.03.2.03	3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	10	Dokumen			59,18	Poin	1 draft dokumen	85,10	59,18	Poin	85,10	90%
2.11.03.2.03.04	3.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	luas lahan yang direhabilitasi			22	Ha	11,63	Ha	10	85,10	11,63	Ha	85,10	90%

2.11.04	IV	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas ruang terbuka hijau yang dikelola (taman, hutan kota)	0,166	%	0,17	%	0,146	%	0,136	40,00	0,146	%	40,00	50%
2.11.04.2.01	1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase luas ruang terbuka hijau yang dikelola (taman, hutan kota)	42	Lokasi			0,146	%	0,136	40,00	0,146	%	40,00	50%
2.11.04.2.01.04	1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				0,136	7,89	Ha	38	40,00	7,89	Ha	40,00	50%
2.11.05	V	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pelaporan Pengendalian B3 dan LB3	100	%			100	%	-	0,50	100	%	0,00	50%
2.11.05.2.02	1	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	6	Laporan			100	%	-	0,50	100	%	0,00	50%
2.11.05.2.02.02	1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Aksi Daerah (Pengurangan dan penghapusan mercury daerah)	1	Dokumen			1	Dokumen	0	0	1	Dokumen	0	50%

2.11.06	XI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah dokumen produk pembinaan dan pengawasan	13	Dokumen Pembinaan dan Pengawasan	13	Dokumen Pembinaan dan Pengawasan	2	Dokumen pembinaan dan pengawasan	2 draft dokumen	17,48	2	Dokumen pembinaan dan pengawasan	17,48	60%
2.11.06.2.01	1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen produk pembinaan dan pengawasan	13	Dokumen Pembinaan dan Pengawasan			2	Dokumen	2 draft dokumen	17,48	2	Dokumen	17,48	60%
2.11.06.2.01.01	1.1	Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah dokumen lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan yang direkomendasikan	8	Dokumen Fasilitasi	3	dokumen	1	Dokumen Fasilitas	Jumlah dokumen lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan yang direkomendasikan	18,17	1	Dokumen Fasilitas	18,17	60%
2.11.06.2.01.02	1.2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah peserta diklat	4	Peserta			4	Orang	Jumlah peserta diklat	0,60	4	Orang	0,00	60%

2.11.06.2.01.03	1.3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengawasan usaha dan/atau kegiatan	4	Dokumen Pengawasan	1	dokumen	1	Dokumen	Jumlah dokumen pengawasan usaha dan/atau kegiatan	22,39	1	Dokumen	22,39	60%
2.11.07	XII	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah dokumen status masyarakat hukum adat, kearifan lokal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup					2	Lokasi		16,24	2	Lokasi	16,24	65%
2.11.07.2.01	1	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Status Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten GarutAdat					2	Lokasi	1 draft dokumen	14,45	2	Lokasi	14,45	65%
2.11.07.2.01.01	1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Belum Adanya Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Secara Legal Formal					2	Lokasi	1 draft dokumen	14,45	2	Lokasi	14,45	65%

2.11.07.2.02	2	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Status Masyarakat Hukum adat di Kabupaten Garut					2	Lokasi		18,29	2	Lokasi	18,29	70%
2.11.07.2.02.01	2.1	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendamping dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah lokasi pemberdayaan MHA					2	Lokasi	proses pelaksanaan	18,29	2	Lokasi	18,29	70%
2.11.08	VIII	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelurahan/desa berbudaya lingkungan	100	%			25	%	0	32,51	25	%	32,51	80%
2.11.08.2.01	1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelurahan/desa berbudaya lingkungan	15	Kecamatan			25	%	10	32,51	25	%	32,51	80%

2.11.08.2.01.01	1.1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	5	Desa/ Kelurahan			5	Desa/ Kelurahan	3	53,75	5	Desa/ Kelurahan	53,75	65%
2.11.08.2.01.02	1.2	Pendamping Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Desa/Kelurahan yang berbudaya lingkungan	5	Desa/ Kelurahan			5	Desa/ Kelurahan	1	8,90	5	Desa/ Kelurahan	8,90	75%
2.11.09	IX	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan kemitraan lingkungan	100	%	100	%	20	%			20	%		60%
2.11.09.2.01	1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Kegiatan			20	%	1 draft dokumen	5,32	20	%	5,32	60%
2.11.09.2.01.01	1.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Fllantropi dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi titik pantau yang dibina (Adipura, Adiwiyata)					10	Entitas	3 lokasi	5,32	10	Entitas	5,32	60%

2.11.10	X	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan	100	%	100	%	100	%	50,00	36,37	100	%	36,37	85%
2.11.10.2.01	1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup	7	Laporan			100	%	1 draft dokumen	36,37	100	%	36,37	85%
2.11.10.2.01.01	1.1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Laporan data pengelolaan pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	4	Laporan	4	Laporan	5	kasus	1 draft laporan	36,67	5	kasus	36,67	85%
								15	kasus			15	kasus		
								20	kasus			20	kasus		
2.11.11	XI	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Tingkat Pengelolaan Sampah					35	%	25	50,00	35	%	50,00	90%
2.11.11.2.01	1	Pengelolaan Sampah	Tingkat Pengelolaan Sampah					35	%	25	50,00	35	%	50,00	90%

2.11. 11.2. 01.02	1.1	Pengurangan Sampah Dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Dokumen evaluasi capaian Jakstrada Jumlah Bangunan TPS 3R dan Unit Pendukung Yang Tersedia (DAK Fisik Reguler) Jumlah Kawasan Yang Terbina Jumlah Lokasi Pendampingan DAK Jumlah Tempat Pembuangan Sampah	55	%	25	%	1 4 1 2 5	Dokumen Lokasi Lokasi Lokasi Buah	0 dokumen 4 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 0 buah	50,00	1 4 1 2 5	Dokumen Lokasi Lokasi Lokasi Buah	50,00	90%
2.11. 11.2. 01.03	1.2	Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilaha, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah alat berat yang beroperasi Penataan TPA	55	%	25	%	4 1	Unit Lokasi	4 unit 1 lokasi	50,00	4 1	Unit Lokasi	50,00	90%
2.11. 11.20 1.04	1.3	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kecamatan yang mengelola sampah					-				-			

2.11. 11.2. 01.05	1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah dumptruck/armroll yang beroperasi Jumlah fuso yang beroperasi Jumlah minitruck yang beroperasi Jumlah motor pengangkut sampah yang beroperasi Jumlah Tenaga Kebersihan Yang Tersedia					44 1 4 31 276	Unit Unit Unit Unit Orang	44 unit 1 unit 4 unit 31 unit 276 orang	50,00	44 1 4 31 276	Unit Unit Unit Unit Orang	50,00	90%
2.11. 11.2. 01.07	1.5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Penyediaan Lahan TPA					1	Lokasi	0 lokasi	60,00	1	Lokasi	60,00	90%

Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut tahun anggaran 2021 adalah Rp. 63.662.132.906,00 (Enam puluh tiga milyar enam ratus enam puluh dua juta lseratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus enam rupiah) dan pendapatan sebesar Rp. 1.062.477.240,00 (Satu milyar enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah).

Jumlah realisasi pada tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 60.755.027.740,00 (Enam puluh milyar tujuh ratus lima puluh lima juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) atau sama dengan 95,43 % dari pagu total. Realisasi pendapatan sebesar Rp.1.005.391.000,00 (satu milyar lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) atau sama dengan 94,63%.

Anggaran dan realisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut tahun 2021, sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1	Pendapatan	1.062.477.240,00	1.005.391.000,00	94,63 %
2	Belanja	63.662.132.906,00	60.755.027.740,00	95,43 %

2.2 . Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 253 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pengelolaan urusan lingkungan hidup dan tugas pembantuan urusan tata lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, konservasi lingkungan dan keanekaragaman hayati, pengelolaan persampahan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sementara itu, komposisi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Garut Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235), maka komposisi jabatan struktural dan jabatan fungsional dapat dilihat sebagai berikut :

No.	Jabatan Struktural/Fungsional	Perbup No. 235 Tahun 2021
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris/Kabid	5
3.	Sub Koordinator	13
4.	Kasubbag/Kepala UPT/Kasubbag UPT	6
Jumlah		25

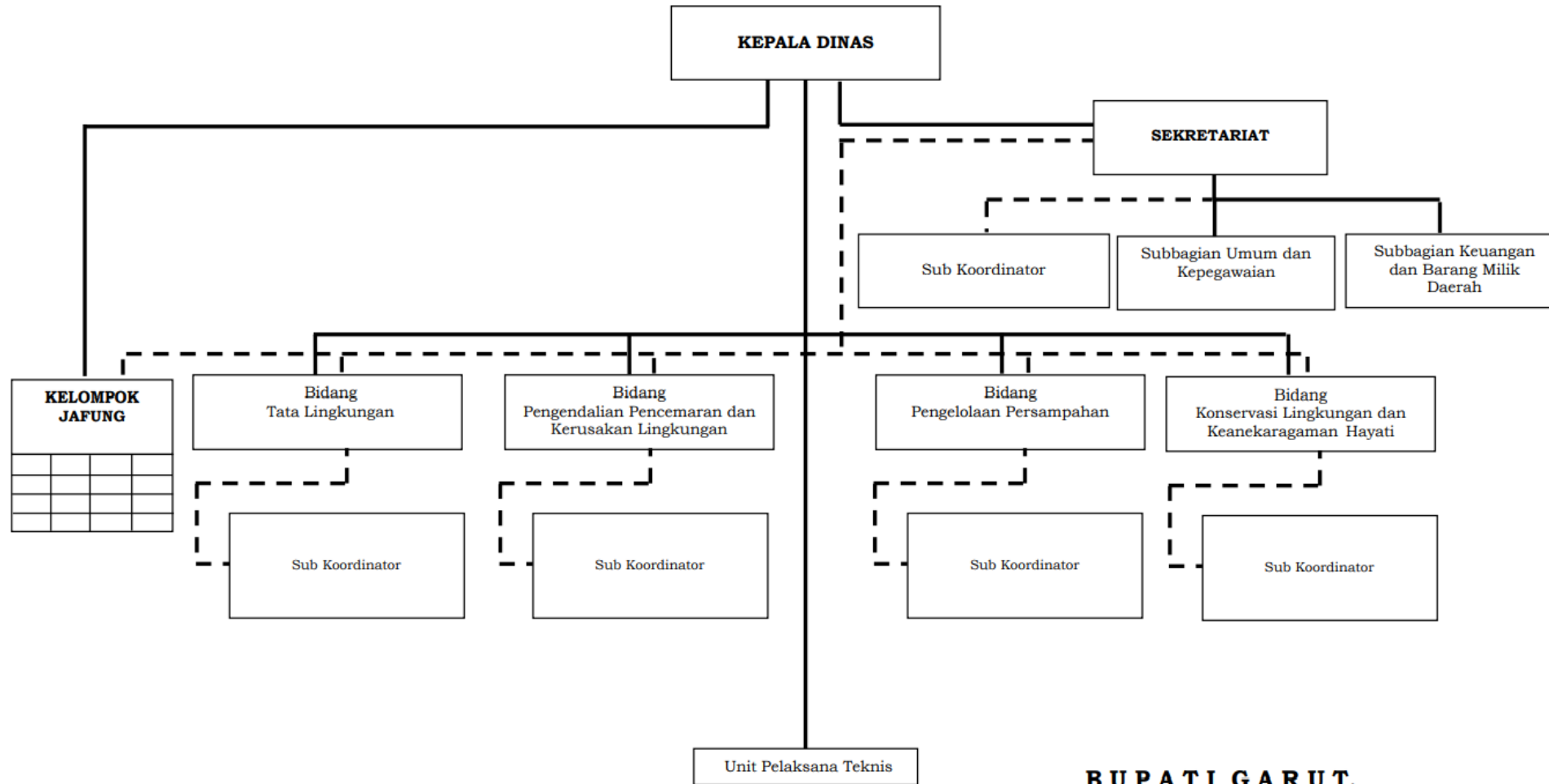
Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian DLH Kabupaten Garut,2021

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas membawahi:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Tata Lingkungan;

- c. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- d. Bidang Pengelolaan Persampahan;
- e. Bidang Konservasi Lingkungan dan Keanekaragaman hayati;
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut dapat dilihat sebagai berikut:



KETERANGAN:
 _____ = GARIS KOMANDO/PEMBINAAN
 - - - - - = GARIS KOORDINASI

**BUPATI GARUT,
t t d
RUDY GUNAWAN**

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akan memberikan porsi kewenangan yang lebih besar namun juga diikuti dengan penegasan sanksi yang lebih tinggi termasuk pengenaan sanksi bagi pemberi izin atau pembiaran terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam urusan lingkungan hidup.

Disamping tantangan, keluarnya Undang-Undang Lingkungan Hidup yang baru juga memberikan peluang untuk meningkatkan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup maupun Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dalam pengawasan dan penindakan pelanggar lingkungan hidup.

Prestasi Tahun 2021

Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sebagai Penerima Penghargaan Sekolah Berbudaya Lingkungan, yaitu MA Daarul Arqam Garut, MTsN I Garut, SDN I Jayaraga Garut, SDN 2 Kota Kulon, SDN Ar Rasyid, SDN 2 Cisurupan.

Capaian target tahun 2021 berdasarkan perjanjian kinerja rata mencapai 100% bahkan lebih. Hal ini dapat dilihat pada semua pencapaian indikator utama yang dapat tercapai sesuai dengan rencana. Untuk detail capaian masing-masing indikator kegiatan dapat dilihat sebagai berikut.

Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Utama RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja 2021	Kondisi Akhir Periode 2024	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	Realisasi 2021
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	56,05 poin	62,31 poin	Lingkungan Hidup	DLH	67,82 poin

Sumber : Bidang P2KL Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut, Desember 2021

Perhitungan IKLH Kabupaten Garut

No	Kab./Kota	Luas Wilayah (km ²)	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	IKLH
1	Garut	3.107,05	90,64 poin	55,00 poin	47,64 poin	67,82 poin

Sumber : Bidang P2KL Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut, Desember 2021

Berdasarkan data laporan capaian tingkat pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut tahun 2021, diketahui bahwa sampah yang dapat diangkut ke TPA adalah sebanyak 672 m³/hari atau sekitar 200,93 ton/hari. Sementara timbulan sampah dari wilayah pelayanan perkotaan sebanyak 287,40 ton/hari, dan timbulan sampah untuk Kabupaten Garut adaah sebesar 1.104,05 ton/hari. Sementara untuk pengurangan sampah diasumsikan sebesar 7,46% dari timbulan sampah Kabupaten Garut, sehingga pengurangan sampah sebesar 82,41 ton/hari. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah sampah yang terkelola yaitu dari data sampah yang dapat diangkut ke TPA dan pengurangan sampah adalah sebanyak 283,34 ton/hari. Untuk memperoleh tingkat pengelolaan sampah, maka diperoleh dari rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Total volume sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total volume timbunan sampah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$$

Dari rumus perhitungan tersebut, maka didapatkan tingkat pengelolaan sampah sebagai berikut :

a. Tingkat Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota

$$\frac{\text{Total volume sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total volume timbunan sampah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} & \frac{283,34}{1.104,05} \times 100\% \\ & = 25,66\% \end{aligned}$$

Pencapaian kinerja pelayanan dengan target dan realisasi capaian tahun 2020 dan 2021 serta proyeksi tahun 2023 dan 2024 disajikan dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

2.2 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				tahun 2020	tahun 2021	tahun 2022	tahun 2023	tahun 2024	tahun 2020	tahun 2021	tahun 2023	tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indeks kualitas lingkungan hidup			56,05 poin	57,62 poin	59,18 poin	60,75 poin	62,31 poin	56,30 poin	67,82 poin	60,75 poin	62,31 poin	
2	Tingkat Pengelolaan Sampah			25%	25%	35%	45%	55%	25,27%	25,66 %	45%	55%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut termasuk ke dalam urusan wajib non pelayanan dasar. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut adalah sebagai berikut ;

1) Permasalahan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di atas terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu:

- a) Jumlah timbulan sampah semakin meningkat, yang disebabkan oleh :
 - Pertambahan jumlah penduduk;
 - Kabupaten Garut menjadi salah satu tujuan wisata di Jawa Barat sehingga jumlah kunjungan wisata semakin meningkat;
 - Pertumbuhan rumah makan, toko oleh-oleh souvenir semakin meningkat.
- b) Peningkatan jumlah timbulan sampah tidak sebanding dengan pertambahan jumlah sarana angkutan sampah;
- c) Permasalahan di TPA Pasirbajing yang terjadi pada saat hujan yaitu banjir sampah ke jalan dan pada musim kemarau terdapat kebakaran sampah.

2) Upaya Pemecahan

Upaya untuk pemecahan permasalahan di atas antara lain:

- a) Pada tahun 2021, upaya-upaya yang dilaksanakan dalam pengelolaan persampahan, diantaranya :
 - Pembangunan TPS 3R
 - Pengadaan mesin pengolah sampah
- b) Kegiatan penataan TPA antara lain pembuatan saluran drainase, pembangunan sanitary *landfill*.

- c) dan pengelolaan lingkungan hidup (KLHS untuk tata ruang dan RPJMD).
- d) Melakukan pemantauan dan pengawasan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Garut, rumusan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 disusun dengan tema ” ***Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat***”.

Program dan kegiatan prioritas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut secara terinci disajikan dalam tabel 2.3. sebagai berikut:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Garut

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting			
Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					2	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR							
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				163.869.265.577	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			100%	163.869.265.577			
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase pemenuhan pelayanan administrasi Perkantoran di Dinas Lingkungan Hidup	100%	23.975.065.577	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			Persentase pemenuhan pelayanan administrasi Perkantoran di Dinas Lingkungan Hidup	100%	23.975.065.577	

2.11.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersedia	7 dokumen	101.000.000	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersedia	7 dokumen	101.000.000	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dokumen	25.000.000	2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dokumen	25.000.000	
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	25.000.000	2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	25.000.000	
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	51.000.000	2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	51.000.000	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia	4 dokumen	19.937.856.742	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia	4 dokumen	19.937.856.742	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	267 orang	19.912.856.742	2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	267 orang	19.912.856.742	

2.11.0 1.2.02. 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi keuangan SKPD	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	1 dokumen	25.000.000	2.11. 01.2. 02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi keuangan SKPD	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	1 dokumen	25.000.000	
2.11.0 1.2.02. 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Jumlah dokumen Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	1 dokumen		2.11. 01.2. 02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Jumlah dokumen Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	1 dokumen		
2.11.0 1.2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1 laporan		2.11. 01.2. 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1 laporan		
2.11.0 1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Jumlah dokumen administrasi BMD yang tersedia	3 dokumen	197.407.685	2.11. 01.2. 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Jumlah dokumen administrasi BMD yang tersedia	3 dokumen	197.407.685	
2.11.0 1.2.03. 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Jumlah dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	187.407.685	2.11. 01.2. 03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Jumlah dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	187.407.685	
2.11.0 1.2.03. 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah	1 laporan	10.000.000	2.11. 01.2. 03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah	1 laporan	10.000.000	

2.11.0 1.2.03. 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Jumlah laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1 laporan		2.11. 01.2. 03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Jumlah laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1 laporan		
2.11.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah			Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang tersedia	2 dokumen	288.700.000	2.11. 01.2. 05	Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah			Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang tersedia	2 dokumen	288.700.000	
2.11.0 1.2.05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut/Kelengkapannya	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut/Kelengkapannya	326 paket	213.700.000	2.11. 01.2. 05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut/Kelengkapannya	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut/Kelengkapannya	326 paket	213.700.000	
2.11.0 1.2.05. 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Tarogong Kidul	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	75.000.000	2.11. 01.2. 05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Tarogong Kidul	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	75.000.000	
2.11.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah yang tersedia	4 dokumen	474.957.200	2.11. 01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah yang tersedia	4 dokumen	474.957.200	
2.11.0 1.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	10.000.000	2.11. 01.2. 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	10.000.000	

2.11.0 1.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	140.000.000	2.11. 01.2. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	140.000.000	
2.11.0 1.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan	2 paket	90.000.000	2.11. 01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan	2 paket	90.000.000	
2.11.0 1.2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	9.956.700	2.11. 01.2. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	9.956.700	
2.11.0 1.2.06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	75.000.000	2.11. 01.2. 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	75.000.000	
2.11.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	150.000.500	2.11. 01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	150.000.500	
2.11.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang yang tersedia	2 dokumen	2.244.433.300	2.11. 01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang yang tersedia	2 dokumen	2.244.433.300	

2.11.0 1.2.07. 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 unit	341.764.100	2.11. 01.2. 07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 unit	341.764.100	
2.11.0 1.2.07. 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	10 unit		2.11. 01.2. 07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	10 unit		
2.11.0 1.2.07. 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	9 Unit	1.650.000.000	2.11. 01.2. 07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	9 Unit	1.650.000.000	
2,11,0 1,207, 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	252.669.200	2,11, 01,20 7,06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	252.669.200	
2.11.0 1.2.07. 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit		2.11. 01.2. 07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit		
2.11.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang yang tersedia	2 dokumen	279.900.650	2.11. 01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang yang tersedia	2 dokumen	279.900.650	

2.11.0 1.2.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Jumlah laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 laporan	99.993.900	2.11.01.2.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Jumlah laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 laporan	99.993.900	
2.11.0 1.2.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Jumlah laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 laporan	179.906.750	2.11.01.2.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Jumlah laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 laporan	179.906.750	
2.11.0 1.2.09	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah dokumen pemeliharaan BMD penunjang urusan yang tersedia	2 dokumen	450.810.000	2.11.01.2.09	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah dokumen pemeliharaan BMD penunjang urusan yang tersedia	2 dokumen	450.810.000	
2.11.0 1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	22 unit kendaraan	200.810.000	2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	22 unit kendaraan	200.810.000	
01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 gedung	250.000.000	01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 gedung	250.000.000	
2.11.0 2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			Persentase dokumen lingkungan yang dievaluasi	100%	3.550.000.000	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			Persentase dokumen lingkungan yang dievaluasi	100%	3.550.000.000	

2.11.0 2.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen RPPLH dan Pendukungnya yang disusun	2 Dokumen	400.000.000	2.11. 02.2. 01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen RPPLH dan Pendukungnya yang disusun	2 Dokumen	400.000.000	
2.11.0 2.2.01. 01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota		Kabupaten Garut	Jumlah dokumen RPPLH dan pendukungnya yang disusun dan jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/Kota yang disusun	2 dokumen	400.000.000	2.11. 02.2. 01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota		Kabupaten Garut	Jumlah dokumen RPPLH dan pendukungnya yang disusun dan jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/Kota yang disusun	2 dokumen	400.000.000	
2.11.0 2.2.01. 02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota			Jumlah dokumen pengendalian dan pelaksanaan RPPLH yang disusun	1 dokumen		2.11. 02.2. 01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota			Jumlah dokumen pengendalian dan pelaksanaan RPPLH yang disusun	1 dokumen		
2.11.0 2.2.02	Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota			Jumlah KLHS yang disusun	7 Dokumen	3.150.000.000	2.11. 02.2. 02	Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota			Jumlah KLHS yang disusun	7 Dokumen	3.150.000.000	
2.11.0 2.2.02. 01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang		Menyesuai kan dengan Prioritas PUPR	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kab/Kota yang Disusun	7 Dokumen	3.150.000.000	2.11. 02.2. 02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang		Menyesuai kan dengan Prioritas PUPR	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kab/Kota yang Disusun	7 Dokumen	3.150.000.000	

2.11.0 2.2.02. 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD			Jumlah Dokumen Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD yang Disusun	1 dokumen	-	2.11. 02.2. 02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD			Jumlah Dokumen Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD yang Disusun	1 dokumen	-	
2.11.0 2.2.02. 03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup			Jumlah dokumen Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang disusun	1 dokumen	-	2.11. 02.2. 02.03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup			Jumlah dokumen Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang disusun	1 dokumen	-	
2.11.0 3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,80 poin	29.789.200.000	2.11. 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,80 poin	29.789.200.000	
2.11.0 3.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			Jumlah dokumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1 dokumen	5.110.000.000	2.11. 03.2. 01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			Jumlah dokumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1 dokumen	5.110.000.000	

2.11.0 3.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Kab Garut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media air, udara, dan laut	1 dokumen	2.310.000.000	2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Kab Garut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media air, udara, dan laut	1 dokumen	2.310.000.000	
2.11.0 3.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Sukanegla, Rancasalak, Padawaaas, Sukalilah, Cipaganti	Garut Kota, Kadungora, Pasirwangi, Sukaresmi, Ciburupan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari setor lingkungan hidup yang dilaksanakan	1 dokumen	850.000.000	2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Sukanegla, Rancasalak, Padawaaas, Sukalilah, Cipaganti	Garut Kota, Kadungora, Pasirwangi, Sukaresmi, Ciburupan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari setor lingkungan hidup yang dilaksanakan	1 dokumen	850.000.000	
2.11.0 3.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Kab Garut	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	1 dokumen	1.950.000.000	2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Kab Garut	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	1 dokumen	1.950.000.000	
2.11.0 3.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			Jumlah dokumen Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	3 dokumen	250.000.000	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			Jumlah dokumen Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	3 dokumen	250.000.000	

2.11.0 3.2.02. 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat		Kab Garut	Jumlah laporan sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	1 laporan	125.000.000	2.11. 03.2. 02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat		Kab Garut	Jumlah laporan sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	1 laporan	125.000.000	
2.11.0 3.2.02. 02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Kab Garut	Jumlah lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang diisolasi	1 lokasi	125.000.000	2.11. 03.2. 02.02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Kab Garut	Jumlah lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang diisolasi	1 lokasi	125.000.000	
2.11.0 3.2.02. 03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Kab Garut	Jumlah lokasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan	1 lokasi		2.11. 03.2. 02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Kab Garut	Jumlah lokasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan	1 lokasi		

2.11.0 3.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			Jumlah dokumen pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	3 dokumen	24.429.200.000	2.11. 03.2. 03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			Jumlah dokumen pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	3 dokumen	24.429.200.000	
2.11.0 3.2.03. 01	Koordinasi dan Sinkronisasi dan Penghentian Sumber Pencemar		Kab Garut	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar	1 Dokumen		2.11. 03.2. 03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar		Kab Garut	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar	1 Dokumen		
2.11.0 3.2.03. 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar		Kab Garut	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar	1 Dokumen	14.429.200.000	2.11. 03.2. 03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar		Kab Garut	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar	1 Dokumen	14.429.200.000	
2.11.0 3.2.03. 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Sukaraja, Samarang, Tanjung Karya, Cisarua, Karyamekar, Padawaas, Barusari , Leles, Cangkuang, Margaluyu, Cikembulan, Tanggulun, Talagasari, Cibatu, Kersamanah, Cisitu, Mekarwangi, Cintamanik, Cinta,	Kecamatan Banyures mi, Kecamatan Samarang, Kecamatan Pasirwangi , Kecamatan Leles, Kecamatan Kadungora , Kecamatan Cibatu,Kec amatan Kersaman ah, Kecamatan Malangbon	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1 Dokumen	10.000.000.000	2.11. 03.2. 03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Sukaraja, Samarang, Tanjung Karya, Cisarua, Karyamekar, Padawaas, Barusari , Leles, Cangkuang, Margaluyu, Cikembulan, Tanggulun, Talagasari, Cibatu, Kersamanah, Cisitu, Mekarwangi, Cintamanik, Cinta,	Kecamatan Banyures mi, Kecamatan Samarang, Kecamatan Pasirwangi , Kecamatan Leles, Kecamatan Kadungora , Kecamatan Cibatu,Kec amatan Kersaman ah, Kecamatan Malangbon	1 Dokumen	10.000.000.000		

		Sindanggalih, Ciela, Sukasenang, Cinisti, Cilawu, Pasanggrahan, Mekarmukti,	g, Kecamatan Sukawenin g, Kecamatan Karangtengah,						Sindanggalih, Ciela, Sukasenang, Cinisti, Cilawu, Pasanggrahan, Mekarmukti,	g, Kecamatan Sukawenin g, Kecamatan Karangtengah,			
		Dangiang, Sukamurni, Sukawangi, Tambakbaya, Pangauban, Simpang, Banjarwangi, Padahurip, Dangiang , Pakenjeng, Garumukti, Panawa, Pananjung, Linggarjati, Nyalindung, Karangsewu, Mekarsewu, Caringin, , Sukamulya, Mekarmukti, Sukalaksana, Selaawi, Cigawir, Cihuni, Tegalpanjang	Kecamatan Bayongbon g,Kecamatan Cilawu,Kecamatan Cisurupan , Kecamatan Cikajang, Kecamatan Banjarwangi. Kecamatan Singajaya, Kecamatan Peundeuy, Kecamatan Cisompet, Kecamatan Cikelet, Kecamatan Bungbulan g, Kecamatan Mekarmukti, Kecamatan Pakenjeng, Kecamatan Pamulihan , Kecamatan						Dangiang, Sukamurni, Sukawangi, Tambakbaya, Pangauban, Simpang, Banjarwangi, Padahurip, Dangiang , Singajaya, Ciudian, Sukawangi, Pancasura, Cigintung , Saribakti, Pangrumasan, Cisompet, Sukanagara, Cikelet, Linggamanik, Cigadog, Pamalayan, Awassagara, Margalaksana, Sinarjaya, Cihikeu, Hegarmanah , Karangwangi, Cijayana, Mekarsari, Neglasari, Pakenjeng, Garumukti,	Kecamatan Bayongbon g,Kecamatan Cilawu,Kecamatan Cisurupan , Kecamatan Cikajang, Kecamatan Banjarwangi. Kecamatan Singajaya, Kecamatan Peundeuy, Kecamatan Cisompet, Kecamatan Cikelet, Kecamatan Bungbulan g, Kecamatan Mekarmukti, Kecamatan Pakenjeng, Kecamatan Pamulihan , Kecamatan			

			Cisewu Kecamatan Caringin, K ecamatan Talegong, Kecamatan Selaawi, Kecamatan Pangatikan , Kecamatan Sucinaraja .						Panawa, Pananjung, Linggarjati, Nyalindung, Karangsewu, Mekarsewu, Caringin, , Sukamulya, Mekarmukti, Sukalaksana, Selaawi, Cigawir, Cihuni, Tegalpanjang	Cisewu Kecamatan Caringin, K ecamatan Talegong, Kecamatan Selaawi, Kecamatan Pangatikan , Kecamatan Sucinaraja .				
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			Persentase luas ruang terbuka hijau yang dikelola (taman, hutan kota)	0,144%	13.530.000.000	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			Persentase luas ruang terbuka hijau yang dikelola (taman, hutan kota)	0,144%	13.530.000.000	

2.11.0 4.2.01	Pengelolaan Keekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			Jumlah lokasi kegiatan pengelolaan ruang terbuka hijau	32 lokasi	13.530.000.000	2.11. 04.2. 01	Pengelolaan Keekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			Jumlah lokasi kegiatan pengelolaan ruang terbuka hijau	32 lokasi	13.530.000.000	
2.11.0 4.2.01. 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keekaragaman Hayati		Kab. Garut	Jumlah dokumen Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keekaragaman Hayati	1 dokumen		2.11. 04.2. 01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keekaragaman Hayati		Kab. Garut	Jumlah dokumen Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keekaragaman Hayati	1 dokumen		
2.11.0 4.2.01. 02	Pengelolaan Taman Keekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan		Karangpaw itan, Cilawu, Banyures mi	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Ha	7.700.000.000	2.11. 04.2. 01.02	Pengelolaan Taman Keekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan		Karangpaw itan, Cilawu, Banyures mi	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Ha	7.700.000.000	
2.11.0 4.2.01. 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Perkotaan Garut	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	7,89 Ha	5.500.000.000	2.11. 04.2. 01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Perkotaan Garut	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	7,89 Ha	5.500.000.000	
2.11.0 4.2.01. 05	Pengelolaan Taman Keekaragaman Hayati Lainnya		Kadungora	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Ha	220.000.000	2.11. 04.2. 01.05	Pengelolaan Taman Keekaragaman Hayati Lainnya		Kadungora	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Ha	220.000.000	
2.11.0 4.2.01. 06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keekaragaman Hayati		Kadungora	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keekaragaman Hayati	30 orang	110.000.000	2.11. 04.2. 01.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keekaragaman Hayati		Kadungora	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keekaragaman Hayati	30 orang	110.000.000	

2.11.0 4.2.01. 07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati			Jumlah lokasi untuk melengkapi sarana dan prasarana Taman Kehati	1 lokasi		2.11. 04.2. 01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati			Jumlah lokasi untuk melengkapi sarana dan prasarana Taman Kehati	1 lokasi		
2.11.0 5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			Persentase pelaporan pengendalian B3 dan LB3	100%	350.000.000	2.11. 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			Persentase pelaporan pengendalian B3 dan LB3	100%	350.000.000	
2.11.0 5.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3			Jumlah laporan data Penyimpanan Sementara limbah B3 pelaku usaha dan/atau kegiatan	1 laporan	150.000.000	2.11. 05.2. 01	Penyimpanan Sementara Limbah B3			Jumlah laporan data Penyimpanan Sementara limbah B3 pelaku usaha dan/atau kegiatan	1 laporan	150.000.000	
2.11.0 5.2.01. 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Kab Garut	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 dokumen	150.000.000	2.11. 05.2. 01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Kab Garut	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 dokumen	150.000.000	

2.11.0 5.2.01. 02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3		Kab Garut	Jumlah laporan kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	12 laporan		2.11. 05.2. 01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3		Kab Garut	Jumlah laporan kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	12 laporan		
2.11.0 5.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah dokumen pengumpulan Limbah B3	2 dokumen	200.000.000	2.11. 05.2. 02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah dokumen pengumpulan Limbah B3	2 dokumen	200.000.000	
2.11.0 5.2.02. 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah		Kab Garut	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin	1 dokumen	200.000.000	2.11. 05.2. 02.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah		Kab Garut	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin	1 dokumen	200.000.000	

	B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			Pengumpulan Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			Pengumpulan Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				
2.11.0 5.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang bukan menjadi kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan kewenangannya	1 dokumen			2.11.05.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang bukan menjadi kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan kewenangannya	1 dokumen		

2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan PPLH	5 Dokumen	725.000.000	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan PPLH	5 Dokumen	725.000.000	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan	5 Dokumen	725.000.000	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan	5 Dokumen	725.000.000	
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		Kabupaten Garut	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	2 dokumen	400.000.000	2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		Kabupaten Garut	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	2 dokumen	400.000.000	

2.11.0 6.2.01. 02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup		Luar Kabupaten Garut	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	4 surat rekomendasi	50.000.000	2.11. 06.2. 01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup		Luar Kabupaten Garut	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	4 surat rekomendasi	50.000.000	
2.11.0 6.2.01. 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Kabupaten Garut	Jumlah dokumen Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2 dokumen	200.000.000	2.11. 06.2. 01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Kabupaten Garut	Jumlah dokumen Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	200.000.000	
2.11.0 6.2.01. 04	Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan dan penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH		Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	1 dokumen	75.000.000	2.11. 06.2. 01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan dan penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH		Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	1 dokumen	75.000.000	
2.11.0 7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			Jumlah status masyarakat hukum adat di kabupaten/kota	3 lokasi	440.000.000	2.11. 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			Jumlah status masyarakat hukum adat di kabupaten/kota	3 lokasi	440.000.000	
2.11.0	Pengakuan MHA,			Jumlah lokasi	1 lokasi		2.11.	Pengakuan MHA,			Jumlah lokasi	1 lokasi	220.000.000	

7.2.01	Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH			Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal yang diakui		220.000.000	07.2.01	Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH			Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal yang diakui			
2.11.0 7.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH		Kab. Garut	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 dokumen	220.000.000	2.11.07.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH		Kab. Garut	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 dokumen	220.000.000	
2.11.0 7.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH					220.000.000	2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH					220.000.000	
2.11.0 7.2.02.01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan		Leles	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal,	1 Dokumen	220.000.000	2.11.07.2.02.01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan		Leles	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal,	1 Dokumen	220.000.000	

	Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH			Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan				Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH			Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan			
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			Persentase kelurahan/desa berbudaya lingkungan	25%	660.000.000	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			Persentase kelurahan/desa berbudaya lingkungan	25%	660.000.000	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	5 kecamatan	660.000.000	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	5 kecamatan	660.000.000	

2.11.0 8.2.01. 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan		Kab. Garut	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	5 Lembaga	220.000.000	2.11. 08.2. 01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan		Kab. Garut	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	5 Lembaga	220.000.000	
2.11.0 8.2.01. 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Kab. Garut	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	5 Dokumen	220.000.000	2.11. 08.2. 01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Kab. Garut	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	5 Dokumen	220.000.000	
2.11.0 8.2.01. 03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup		Kab. Garut	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	100 Orang	220.000.000	2.11. 08.2. 01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup		Kab. Garut	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	100 Orang	220.000.000	
2.11.0 9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			Persentase peningkatan kemitraan lingkungan	20%	550.000.000	2.11. 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			Persentase peningkatan kemitraan lingkungan	20%	550.000.000	
2.11.0	Pemberian			Jumlah kegiatan	1 kegiatan		2.11.	Pemberian			Jumlah kegiatan	1 kegiatan	550.000.000	

9.2.01	Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten		550.000.000	09.2.01	Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten			
2.11.0 9.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Kab. Garut	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	10 Entitas	550.000.000	2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Kab. Garut	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	10 Entitas	550.000.000	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			Persentase penyelesaian kasus lingkungan hidup	100%	300.000.000	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			Persentase penyelesaian kasus lingkungan hidup	100%	300.000.000	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			Jumlah laporan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	2 laporan	300.000.000	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			Jumlah laporan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	2 laporan	300.000.000	

2.11.1 0.2.01. 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota		Kab Garut	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	1 dokumen	150.000.000	2.11. 10.2. 01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota		Kab Garut	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	1 dokumen	150.000.000	
2.11.1 0.2.01. 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan		Kab Garut	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	1 dokumen	150.000.000	2.11. 10.2. 01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan		Kab Garut	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	1 dokumen	150.000.000	
2.11.1 1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			Tingkat Pengelolaan Sampah	35%	90.000.000.000	2.11. 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			Tingkat Pengelolaan Sampah	35%	90.000.000.000	
2.11.1 1.2.01	Pengelolaan Sampah			Tingkat Pengelolaan Sampah	35%	90.000.000.000	2.11. 11.2. 01	Pengelolaan Sampah			Tingkat Pengelolaan Sampah	35%	90.000.000.000	
2.11.1 1.2.01. 01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota		Kabupaten Garut	Jumlah dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang disusun	1 dokumen		2.11. 11.2. 01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota		Kabupaten Garut	Jumlah dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang disusun	1 dokumen		
2.11.1 1.2.01. 02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan,	Kel. Kota Kulon, Kel. Kota Wetan,	Garut Kota, Tarogong	Jumlah laporan hasil Pengurangan Sampah dengan	1 laporan	9.000.000.000	2.11. 11.2. 01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan	Kel. Kota Kulon, Kel. Kota Wetan,	Garut Kota, Tarogong	Jumlah laporan hasil Pengurangan Sampah dengan	1 laporan	9.000.000.000	

	Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kel. Pakuwon, Kel. Ciwalen, Kel. Pamunggir, Desa Langensari, Desa Sukakarrya, Desa Sukajaya, Desa Haurpanggung, Desa Mekarsari, Desa Bagendit, Desa Pandawaas, Desa Cangkuang, Desa Kereseck, Desa Sanding, Desa Panembong, Desa Mulyasari, Desa Pakuon, Desa Cipaganti, Desa Padamukti, Desa Mancagahar,	Kaler, Tarogong Kidul, Banyuresmi, Pasirwangi, Leles, Cibatu, Malangbon, Bayongbon, Cisurupan, Sukaresmi, Pameungpeuk, Cisompet, Cibalong, Cikelet, Cisewu, Talegong, Selaawi, Pangatikan, Sucinaraja	melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali				Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kel. Pakuwon, Kel. Ciwalen, Kel. Pamunggir, Desa Langensari, Desa Sukakarrya, Desa Sukajaya, Desa Haurpanggung, Desa Mekarsari, Desa Bagendit, Desa Pandawaas, Desa Cangkuang, Desa Kereseck, Desa Sanding, Desa Panembong, Desa Mulyasari, Desa Pakuon, Desa Cipaganti, Desa Padamukti, Desa Mancagahar,	Kaler, Tarogong Kidul, Banyuresmi, Pasirwangi, Leles, Cibatu, Malangbon, Bayongbon, Cisurupan, Sukaresmi, Pameungpeuk, Cisompet, Cibalong, Cikelet, Cisewu, Talegong, Selaawi, Pangatikan, Sucinaraja	melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali			
--	---	---	---	---	--	--	--	---	---	---	---	--	--	--

		Desa Neglasari, Desa Karyaukti, Desa Sagara,Desa Cijambe, Desa Pamalayan, Desa Mekarmulya, Desa Selaawi, Desa, Saamida, Desa Babakan Loa, Desa Tegalpanjang							Desa Neglasari, Desa Karyaukti, Desa Sagara,Desa Cijambe, Desa Pamalayan, Desa Mekarmulya, Desa Selaawi, Desa, Saamida, Desa Babakan Loa, Desa Tegalpanjang					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.11.1 1.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Sukaraja	Banyures mi	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, dolah, diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	73000 ton	25.400.000.000	2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Sukaraja	Banyures mi	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, dolah, diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	73000 ton	25.400.000.000	
---------------------	---	----------	-------------	---	-----------	----------------	-----------------	---	----------	-------------	---	-----------	----------------	--

2.11.1 1.2.01. 04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		Garut Kota, Tarogong Kaler, Tarogong Kidul, Banyuresmi	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak mlainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	1 kelompok	600.000.000	2.11. 11.2. 01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		Garut Kota, Tarogong Kaler, Tarogong Kidul, Banyuresmi	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak mlainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	1 kelompok	600.000.000	
2.11.1 1.2.01. 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan		Kabupaten Garut	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun pihak lain di luar kabupaten/kota untuk pengelolaan sampah Kabupaten/Kota, [engelolaan persampahan sesuai dengan rencana induk peneglolaan sampahdan mengacu kepada jakstrada	1 dokumen	30.000.000.000	2.11. 11.2. 01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan		Kabupaten Garut	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun pihak lain di luar kabupaten/kota untuk pengelolaan sampah Kabupaten/Kota, [engelolaan persampahan sesuai dengan rencana induk peneglolaan sampahdan mengacu kepada jakstrada	1 dokumen	30.000.000.000	

2.11.1 1.2.01. 06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan		Kabupaten Garut	Jumlah dokumen Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 dokumen	-	2.11. 11.2. 01.06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan		Kabupaten Garut	Jumlah dokumen Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 dokumen	-	
2.11.1 1.2.01. 07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Banyures mi, Pameungp euk, Caringin, Malangbon g	Jumlah Sarana dan Prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, penagngkutan, pengolahandan pemrosesan akhir	97 unit	25.000.000.000	2.11. 11.2. 01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Banyures mi, Pameungp euk, Caringin, Malangbon g	Jumlah Sarana dan Prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, penagngkutan, pengolahandan pemrosesan akhir	97 unit	25.000.000.000	

2.5. Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan berdasarkan usulan dari masing-masing bidang/sekretariat/UPT pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut serta dari RPTK dan masyarakat yang dilaksanakan pada forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten. Adapun usulan program dan kegiatan disajikan dalam tabel 2.4. sebagai berikut :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Garut

No	Program Kegiatan		Lokasi		Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2		3		4	5	6
1	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					
	2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Sukaraja, Samarang, Tanjung Karya, Cisarua, Karyamekar, Padawaas, Barusari , Leles, Cangkuang, Margaluyu, Cikembulan, Tanggulun, Talagasari, Cibatu, Kersamanah, Cisitu, Mekarwangi, Cintamanik, Cinta, Sindanggalih, Ciela, Sukasenang, Cinisti, Cilawu, Pasanggrahan, Mekarmukti, Dangi, Sukamurni, Sukawangi, Tambakbaya, Pangauban, Simpang, Banjarwangi, Padahurip, Dangi ,	Kecamatan Banyuresmi, Kecamatan Samarang, Kecamatan Pasirwangi, Kecamatan Leles, Kecamatan Kadungora, Kecamatan Cibatu, Kecamatan Kersamanah, Kecamatan Malangbong, Kecamatan Sukawening, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Bayongbong, Kecamatan Cilawu, Kecamatan Cisarupan, Kecamatan Cikajang, Kecamatan Banjarwangi.	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1 Dokumen	

No	Program Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan	
1	2		3	4	5	6	
			Singajaya, Ciudian, Sukawangi, Pancasura, Cigintung , Saribakti, Pangrumasan, Cisompet, Sukanagara, Cikelet, Linggamanik, Cigadog, Pamalayan, Awassagara, Margalaksana, Sinarjaya, Cihikeu, Hegarmanah , Karangwangi, Cijayana, Mekarsari, Neglasari, Pakenjeng, Jatiwangi, Tegalgede, Pakenjeng, Garumukti, Panawa, Pananjung, Linggarjati, Nyalindung, Karangsewu, Mekarsewu, Caringin, , Sukamulya, Mekarmukti, Sukalaksana, Selaawi, Cigawir, Cihuni, Tegalpanjang	Kecamatan Singajaya, Kecamatan Peundeuy, Kecamatan Cisompet, Kecamatan Cikelet, Kecamatan Bungbulang, Kecamatan Mekarmukti, Kecamatan Pakenjeng, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Cisewu Kecamatan Caringin, Kecamatan Talegong, Kecamatan Selaawi, Kecamatan Pangatikan, Kecamatan Sucinaraja.			
2	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah					

No	Program Kegiatan		Lokasi		Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2		3		4	5	6
	2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kel. Kota Kulon, Kel. Kota Wetan, Kel. Pakuwon, Kel. Ciwalen, Kel. Paminggir, Desa Langensari, Desa Sukakarrya, Desa Sukajaya, Desa Haurpanggung, Desa Mekarsari, Desa Bagendit, Desa Pandawaas, Desa Cangkuang, Desa Kereseck, Desa Sanding, Desa Panembong, Desa Mulyasari, Desa Pakuon, Desa Cipaganti, Desa Padamukti, Desa Mancagahar,	Garut Kota, Tarogong Kaler, Tarogong Kidul, Banyuresmi, Pasirwangi, Leles, Cibatu, Malangbong, Bayongbong, Cisurupan, Sukaresmi, Pameungpeuk, Cisompel, Cibalong, Cikelet, Cisewu, Talegong, Selaawi, Pangatikan, Sucinaraja	Jumlah laporan hasil Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1 laporan	
			Desa Neglasari, Desa Karyaukti, Desa Sagara, Desa Cijambe, Desa Pamalayan, Desa Mekarmulya, Desa Selaawi, Desa Saamida, Desa Babakan Loa, Desa Tegalpanjang				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Indonesia tahun 2020-2024 adalah Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Guna mencapai visi tersebut maka dibuat Sembilan misi atau RPJMN, yang salahsatunya adalah Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Berdasarkan Perpres No.18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 -2024 posisi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RPJMN IV memiliki Prioritas Nasional “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim” (PN/AP 6), dan mempunyai Program Nasional yang salah satunya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP.1).

Salah satu isu strategis nasional diantaranya adalah Isu Lingkungan, yaitu kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan, terdiri dari:

- Ketahanan Air
- Pengelolaan Sampah, B3
- Kerusakan Lingkungan
- Kualitas Udara
- Kehati
- Kesehatan Masyarakat
- Pendidikan Lingkungan

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dalam mewujudkan sasaran strategis yaitu terwujudnya lingkungan hidup

yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim maka arah kebijakan dan strateginya mencakup :

1. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan strategi : mengendalikan pencemaran udara, mengendalikan pencemaran, mengendalikan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lahan gambut, mengendalikan kerusakan lahan akses terbuka;
2. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan strategi : meningkatkan penanganan sampah, melakukan pengurangan timbulan sampah sekitar 30% dari proyeksi timbulan sampah, melaksanakan pengurangan tingkat kebocoran sampah ke laut, meningkatkan pengelolaan B3, melakukan verifikasi pengelolaan limbah B3 dan Non B3, melakukan pembinaan dan penilaian kinerja limbah B3 dan non B3, meningkatkan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3;
3. Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan strategi : fasilitasi dan koordinasi pemulihan Kawasan Hidrologi Gambut, pemulihan kerusakan lahan akses terbuka, pemulihan kerusakan ekosistem pesisir, pemulihan DAS dan ekosistemnya serta perlindungan sumber mata air;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor dengan strategi : pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan/atau kegiatan, peningkatan kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah, peningkatan kesadaran sektor swasta/unit usaha dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, penyiapan policy brief untuk konsep Forest City;
5. Peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim, yang dilaksanakan dengan strategi : adaptasi perubahan iklim,

mitigasi perubahan iklim, pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca.

Sasaran strategis yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai selama periode lima tahun yang akan datang dengan adanya hasil/dampak (outcome/impact) dari program. Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,71 poin	68,96 poin	69,22 poin	69,48 poin	69,74 poin

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi, maka Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan Pemerintah Propinsi maupun Pusat. Dalam melaksanakan fungsi- fungsi tersebut maka kegiatan yang akan dilakukan diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan di atasnya, mempunyai rasa keadilan, pemerataan dan diarahkan implementasinya akan dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Garut, dalam menetapkan Visinya selain berpegang pada isu strategis lingkungan hidup, juga harus mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu : " Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera".

Tujuan dari misi jangka panjang Kabupaten Garut yang dijabarkan dalam RPJPD 2005 - 2025 yang berkaitan dengan Dinas Lingkungan adalah "Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang

Berkeadilan Sesuai Daya Dukung dan Daya Fungsi Ruang”. Sedangkan tujuan dari visi Kabupaten Garut yang dijabarkan dalam Perubahan RPJMD 2019 – 2024 yang berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup adalah “Terwujudnya sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan”.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan adalah yaitu “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup”. Keterkaitan antara Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024 dapat dilihat sebagai berikut berikut:

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	56,05 poin	57,62 poin	59,18 poin	60,75 poin	62,31 poin
			Tingkat Pengelolaan Sampah	25%	25%	35%	45%	55%

Perumusan kebijakan pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024 diarahkan untuk merealisasikan 8 (delapan) janji Bupati dan Wakil Bupati periode pada saat kampanye. Program janji kampanye yang terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup adalah Program ke tujuh, yaitu “Pelestarian Lingkungan Hidup”, yang mempunyai target:

- Reboisasi 2.000 ha lahan gundul dengan melibatkan masyarakat;
- Menambah hutan kota dan taman kota;
- Menciptakan lingkungan Garut bersih tanpa sampah.

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan,

akan memberikan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun aspek daya saing daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana Program dan Kegiatan tahun 2023 secara rinci disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut

TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN GARUT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR								
2,11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				163.869.265.577				160.430.712.442

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2.11 .01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	23.975.065.577		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi Perkantoran di Dinas Lingkungan Hidup	100%	21.315.712.442
	2.11 .01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7 dokumen	101.000.000		Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersedia	7 dokumen	101.000.000
	2.11 .01. 2.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tarogong Kidul	1 dokumen	25.000.000	APBD II	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dokumen	25.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11 .01. 2.01 .06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tarogong Kidul	5 laporan	25.000.000	APBD II	Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	25.000.000
2.11 .01. 2.01 .07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tarogong Kidul	1 laporan	51.000.000	APBD II	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	51.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2.11 .01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen admistrasi keuangan yang tersedia		4 dokumen	19.937.856.742		Jumlah dokumen admistrasi keuangan yang tersedia	4 dokumen	19.937.856.742
	2.11 .01. 2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Tarogong Kidul	267 orang	19.912.856.742	APBD II	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	267 orang	19.912.856.742
	2.11 .01. 2.02 .03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	Tarogong Kidul	1 dokumen	25.000.000	APBD II	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	1 dokumen	25.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.11 .01. 2.02 .06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Tarogong Kidul	1 dokumen			Jumlah dokumen Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	1 dokumen
	2.11 .01. 2.02 .07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Tarogong Kidul	1 laporan			Jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1 laporan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.11 .01. 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		3 dokumen	197.407.685		Jumlah dokumen administrasi BMD yang tersedia	3 dokumen	210.000.000
	2.11 .01. 2.03 .02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tarogong Kidul	1 dokumen	187.407.685	APBD II	Jumlah dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	200.000.000
	2.11 .01. 2.03 .06	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tarogong Kidul	1 laporan	10.000.000	APBD II	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah	1 laporan	10.000.000
	2.11 .01. 2.03 .07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Tarogong Kidul	1 laporan			Jumlah laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1 laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2.11 .01. 2.05	Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang tersedia	2 dokumen		288.700.000		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang tersedia	2 dokumen	313.700.000
	2.11 .01. 2.05 .02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut/Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut/Keengkapannya	Tarogong Kidul	326 paket	213.700.000	APBD II	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut/Kelengkapannya	326 paket	213.700.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2.11 .01. 2.05 .10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tarogong Kidul	50 orang	75.000.000	APBD II	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	100.000.000
	2.11 .01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersedia		6 dokumen	474.957.200		Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	2 dokumen	553.161.800
	2.11 .01. 2.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Tarogong Kidul	1 paket	10.000.000	APBD II	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1 paket	35.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Kantor		
2.11 .01. 2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bangunan Kantor Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tarogong Kidul	1 paket	140.000.000	APBD II	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	198.161.800
2.11 .01. 2.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan	Tarogong Kidul	2 paket	90.000.000	APBD II	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan	2 paket	90.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11 .01. 2.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Tarogong Kidul	1 dokumen	9.956.700	APBD II	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	
2.11 .01. 2.06 .08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tarogong Kidul	1 laporan	75.000.000	APBD II	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	80.000.000
2.11 .01. 2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tarogong Kidul	1 laporan	150.000.500	APBD II	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	150.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.11 .01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 dokumen	2.244.433.300		Jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah yang tersedia	4 dokumen	-
	2.11 .01. 2.07 .01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tarogong Kidul	1 unit	341.764.100	APBD II	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 unit	
	2.11 .01. 2.07 .02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tarogong Kidul	10 unit			Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	10 unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		disediakan							
2.11 .01. 2.07 .09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Tarogong Kidul	9 Unit	1.650.000.000	APBD II	Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	9 Unit	
2,11 ,01, 207, 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Tarogong Kidul	1 unit	252.669.200	APBD II	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2.11 .01. 2.07 .10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Tarogong Kidul	1 unit			Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	
	2.11 .01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang yang tersedia		2 dokumen	279.900.650		Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang yang tersedia	2 dokumen	99.993.900

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11 .01. 2.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Tarogong Kidul	1 laporan	99.993.900	APBD II	Jumlah laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 laporan	99.993.900
2.11 .01. 2.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Tarogong Kidul	1 laporan	179.906.750	APBD II	Jumlah laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 laporan	
2.11 .01. 2.09	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pemeliharaan BMD penunjang urusan yang tersedia		2 dokumen	450.810.000		Jumlah dokumen pemeliharaan BMD penunjang urusan yang tersedia	2 dokumen	100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2.11 .01. 2.09 .01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Tarogong Kidul	22 unit kendaraan	200.810.000	APBD II	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	22 unit kendaraan	100.000.000
	01.2 .09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi	Tarogong Kidul	1 gedung	250.000.000	APBD II	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 gedung	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2.11 .02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		100%	3.550.000.000		Persentase dokumen lingkungan yang dievaluasi	100%	3.000.000.000
	2.11 .02. 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		2 Dokumen	400.000.000		Jumlah Dokumen RPPLH dan Pendukungnya yang disusun	2 Dokumen	250.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11 .02. 2.01 .01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH dan pendukungnya yang disusun dan jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/Kota yang disusun	Kabupaten Garut	2 dokumen	400.000.000	APBD II	Jumlah dokumen RPPLH dan pendukungnya yang disusun dan jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/Kota yang disusun	2 dokumen	250.000.000
2.11 .02. 2.01 .02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian dan pelaksanaan RPPLH yang disusun		1 dokumen			Jumlah dokumen pengendalian dan pelaksanaan RPPLH yang disusun	1 dokumen	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2.11 .02. 2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah KLHS yang disusun		7 Dokumen	3.150.000.000		Jumlah KLHS yang disusun	7 Dokumen	2.750.000.000
	2.11 .02. 2.02 .01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kab/Kota yang Disusun	Menyesuaikan dengan Prioritas PUPR	7 Dokumen	3.150.000.000	APBD II	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kab/Kota yang Disusun	7 Dokumen	2.750.000.000
	2.11 .02. 2.02 .02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJ		1 dokumen	-		Jumlah Dokumen Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJM	1 dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		MD yang Disusun					D yang Disusun		
2.11 .02. 2.02 .03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang disusun		1 dokumen	-		Jumlah dokumen Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang disusun	1 dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	2.11 .03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		63,80 poin	29.789.200.000		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,80 poin	17.410.000.000
	2.11 .03. 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		1 dokumen	5.110.000.000		Jumlah dokumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1 dokumen	5.110.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2.11 .03. 2.01 .01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media air, udara, dan laut	Kab Garut	1 dokumen	2.310.000.000	APBD II, DAK	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media air, udara, dan laut	1 dokumen	2.450.000.000
	2.11 .03. 2.01 .02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari setor lingkungan hidup yang dilaksanakan	Garut Kota, Kadungora, Pasirwangi, Sukaresmi, Cisurupan	1 dokumen	850.000.000	APBD II	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari setor lingkungan hidup yang dilaksanakan	1 dokumen	660.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2.11 .03. 2.01 .03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	Kab Garut	1 dokumen	1.950.000.000	APBD II, APBD I, DAK	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	1 dokumen	2.000.000.000
	2.11 .03. 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/		3 dokumen	250.000.000		Jumlah dokumen Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/K	3 dokumen	300.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kota					ota		
2.11 .03. 2.02 .01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah laporan sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/ Kota yang	Kab Garut	1 laporan	125.000.000	APBD II	Jumlah laporan sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan	1 laporan	150.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		dilaksanakan								
	2.11 .03. 2.02 .02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang diisolasi	Kab Garut	1 lokasi	125.000.000	APBD II	Jumlah lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang diisolasi	1 lokasi	150.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2.11 .03. 2.02 .03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan	Kab Garut	1 lokasi			Jumlah lokasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan	1 lokasi	
	2.11 .03. 2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		3 dokumen	24.429.200.000		Jumlah dokumen pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	3 dokumen	12.000.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11 .03. 2.03 .01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar	Kab Garut	1 Dokumen			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar	1 Dokumen	
2.11 .03. 2.03 .02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar	Kab Garut	1 Dokumen	14.429.200.000	APBD II	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar	1 Dokumen	1.750.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11 .03. 2.03 .04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kecamatan Banyuresmi, Kecamatan Samarang, Kecamatan Pasirwangi, Kecamatan Leles, Kecamatan Kadungora, Kecamatan Cibatu, Kecamatan Kersamanah, Kecamatan Malangbong, Kecamatan Sukawening, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Bayongbong, Kecamatan Cilawu, Kecamatan Cisarupan,	1 Dokumen	10.000.000.000	APBD II	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1 Dokumen	10.250.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kecamatan Cikajang, Kecamatan Banjarwangi, Kecamatan Singajaya, Kecamatan Peundeuy, Kecamatan Cisompet, Kecamatan Cikelet, Kecamatan Bungbulang, Kecamatan Mekarmukti, Kecamatan Pakenjeng, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Cisewu Kecamatan						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Caringin, Kecamatan Talegong, Kecamatan Selaawi, Kecamatan Pangatikan, Kecamatan Sucinaraja.						
4	2.11 .04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas ruang terbuka hijau yang dikelola (taman, hutan kota)	0,144%	13.530.000.000		Persentase luas ruang terbuka hijau yang dikelola (taman, hutan kota)	0,144%	13.530.000.000
	2.11 .04. 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi kegiatan pengelolaan ruang terbuka hijau	32 lokasi	13.530.000.000		Jumlah lokasi kegiatan pengelolaan ruang terbuka hijau	32 lokasi	13.530.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2.11 .04. 2.01 .01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah dokumen Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Garut	1 dokumen			Jumlah dokumen Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1 dokumen	
	2.11 .04. 2.01 .02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	Karangpawitan, Cilawu, Banyuresmi	10 Ha	7.700.000.000	APBD II	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	10 Ha	7.700.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11 .04. 2.01 .04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	Perkotaan Garut	7,89 Ha	5.500.000.000	APBD II	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	7,89 Ha	5.500.000.000
2.11 .04. 2.01 .05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	Perkotaan Garut	4 Ha	220.000.000	APBD II	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	4 Ha	220.000.000
2.11 .04. 2.01 .06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Perkotaan Garut	30 orang	110.000.000	APBD II	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	30 orang	110.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.11 .04. 2.01 .07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah lokasi untuk melengkapi sarana dan prasarana Taman Kehati	1 lokasi		APBD II	Jumlah lokasi untuk melengkapi sarana dan prasarana Taman Kehati	1 lokasi	
5	2.11 .05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pelaporan pengendalian B3 dan LB3	100%	350.000.000		Persentase pelaporan pengendalian B3 dan LB3	100%	700.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.11 .05. 2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah laporan data Penyimpanan Sementara limbah B3 pelaku usaha dan/atau kegiatan	1 laporan	150.000.000		Jumlah laporan data Penyimpanan Sementara limbah B3 pelaku usaha dan/atau kegiatan	1 laporan	325.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11 .05. 2.01 .01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab Garut	1 dokumen	150.000.000	APBD II	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 dokumen	175.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2.11 .05. 2.01 .02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah laporan kegiatan verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab Garut	12 laporan		APBD II	Jumlah laporan kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	12 laporan	150.000.000
	2.11 .05. 2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengumpulan Limbah B3		2 dokumen	200.000.000		Jumlah dokumen pengumpulan Limbah B3	2 dokumen	375.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11 .05. 2.02 .01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab Garut	1 dokumen	200.000.000	APBD II	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 dokumen	225.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2.11 .05. 2.02 .02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang bukan menjadi	1 dokumen		APBD II	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang bukan menjadi kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta	1 dokumen	150.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		kewenangan Pemda Kabupaten/ Kota serta pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan kewenangannya					pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan kewenangannya		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	2.11 .06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		5 Dokumen	725.000.000		Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan PPLH	5 Dokumen	825.000.000
	2.11 .06. 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		5 Dokumen	725.000.000		Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan	5 Dokumen	825.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11 .06. 2.01 .01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Kabupaten Garut	2 dokumen	400.000.000	APBD II	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	2 dokumen	500.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11 .06. 2.01 .02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Luar Kabupaten Garut	4 surat rekomendasi	50.000.000	APBD II	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	4 surat rekomendasi	50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11 .06. 2.01 .03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Garut	2 dokumen	200.000.000	APBD II	Jumlah dokumen Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	200.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2.11 .06. 2.01 .04	Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan dan penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	Kabupaten Garut	1 dokumen	75.000.000	APBD II	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	1 dokumen	75.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	2.11 .07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		3 lokasi	440.000.000		Jumlah status masyarakat hukum adat di kabupaten/kota	3 lokasi	440.000.000
	2.11 .07. 2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		1 lokasi	220.000.000		Jumlah lokasi Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal yang diakui	1 lokasi	220.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11 .07. 2.01 .01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Kab. Garut	1 dokumen	220.000.000	APBD II	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 dokumen	220.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.11 .07. 2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH			220.000.000				220.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2.11 .07. 2.02 .01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Leles	1 Dokumen	220.000.000	APBD II	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1 Dokumen	220.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	2.11 .08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		25%	660.000.000		Persentase kelurahan/ desa berbudaya lingkungan	25%	660.000.000
	2.11 .08. 2.01	Penyelenggaraan pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		5 kecamatan	660.000.000		Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	5 kecamatan	660.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2.11 .08. 2.01 .01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/ kelompok Masyarakat/ Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Kab. Garut	5 Lembaga	220.000.000	APBD II	Jumlah Lembaga/ kelompok Masyarakat/ Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	5 Lembaga	220.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2.11 .08. 2.01 .02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kab. Garut	5 Dokumen	220.000.000	APBD II	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	5 Dokumen	220.000.000
	2.11 .08. 2.01 .03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat	Kab. Garut	100 Orang	220.000.000	APBD II	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat	100 Orang	220.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	2.11 .09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan kemitraan lingkungan		20%	550.000.000		Persentase peningkatan kemitraan lingkungan	20%	550.000.000
	2.11 .09. 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten		1 kegiatan	550.000.000		Jumlah kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten	1 kegiatan	550.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2.11 .09. 2.01 .01	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Kab. Garut	10 Entitas	550.000.000	APBD II	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	10 Entitas	550.000.000
10	2.11 .10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelesaian kasus lingkungan hidup		100%	300.000.000		Persentase penyelesaian kasus lingkungan hidup	100%	350.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.11 .10. 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		2 laporan	300.000.000		Jumlah laporan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	2 laporan	350.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11 .10. 2.01 .01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Kab Garut	1 dokumen	150.000.000	APBD II	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti /ditangani	1 dokumen	175.000.000
2.11 .10. 2.01 .02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan	Kab Garut	1 dokumen	150.000.000	APBD II	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar	1 dokumen	175.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan					Pengadilan atau melalui Pengadilan			
11	2.11 .11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Tingkat Pengelolaan Sampah	35%	90.000.000.000		Tingkat Pengelolaan Sampah	35%	101.650.000.000
	2.11 .11. 2.01	Pengelolaan Sampah		Tingkat Pengelolaan Sampah	35%	90.000.000.000		Tingkat Pengelolaan Sampah	35%	101.650.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2.11 .11. 2.01 .01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota yang disusun	Kabupaten Garut	1 dokumen			Jumlah dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota yang disusun	1 dokumen	
	2.11 .11. 2.01 .02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah laporan hasil Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Garut Kota, Tarogong Kaler, Tarogong Kidul, Banyuresmi, Pasirwangi, Leles, Cibatu, Malangbong, Bayongbong, Cisurupan, Sukaresmi, Pameungpeuk, Cisompet, Cibalong, Cikelet,	1 laporan	9.000.000.000	APBD II, APBD I, DAK	Jumlah laporan hasil Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1 laporan	10.000.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Cisewu, Talegong, Selaawi, Pangatikan, Sucinaraja						
2.11 .11. 2.01 .03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, dolah, diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Banyuresmi	73000 ton	25.400.000.000	APBD II, APBD I, DAK	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, dolah, diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	73000 ton	26.000.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11 .11. 2.01 .04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak mlainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Garut Kota, Tarogong Kaler, Tarogong Kidul, Banyuresmi	1 kelompok	600.000.000	APBD II	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak mlainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	1 kelompok	650.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11 .11. 2.01 .05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun pihak lain di luar kabupaten/kota untuk pengelolaan sampah Kabupaten/ Kota, [engelolaan	Kabupaten Garut	1 dokumen	30.000.000.000	APBD II, APBD I, DAK	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun pihak lain di luar kabupaten/kota untuk pengelolaan sampah Kabupaten/Kota, [engelolaan persampahan sesuai dengan rencana induk peneglolaan sampahdan	1 dokumen	35.000.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		persampahan sesuai dengan rencana induk peneglolaan sampahdan mengacu kepada jakstrada					mengacu kepada jakstrada		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.11.2.01.06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan yang disusun	Kabupaten Garut	1 dokumen	-	APBD II, APBD I, DAK	Jumlah dokumen Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 dokumen	
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, penagngkutan, pengolahan	Banyuresmi, Cibalong/ Pameungpeuk, Caringin, Malangbong	97 unit	25.000.000.000	APBD II, APBD I, DAK	Jumlah Sarana dan Prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, penagngkutan, pengolahan pemrosesan akhir	97 unit	30.000.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pemrosesan akhir							

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Tahun 2023 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2023 dan prakiraan maju Tahun 2024 disajikan pada Tabel 4.1. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan DLH Kabupaten Garut. Selain itu, pada Tabel 4.1 disajikan pula program prioritas pembangunan daerah Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2023.

TABEL 4.1

RENCANA KERJA TAHUN 2023

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GARUT

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sum-ber Dana Lain-nya	Total		SKPD Penang-gung Jawab	Jenis Kegiat-an	Kate-gori Kegiat-an
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																			
2,11	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup									123.290.065.577	15.500.000.000	24.929.200.000	-	163.869.265.577	160.430.712.442	DLH		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sum-ber Dana Lain-nya	Total		SKPD Penang-gung Jawab	Jenis Kegiat-an	Kate-gori Kegiat-an
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2.11.01					Persen-tase pemenuhan pelayanan administrasi Perkantoran di Dinas Lingkungan Hidup	100%					23.975.065.577				23.975.065.577	21.315.712.442			
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersedia	7 dokumen			101.000.000				101.000.000	101.000.000			
	2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul				Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dokumen	25.000.000				25.000.000	25.000.000		L	
	2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul				Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi	5 laporan	25.000.000				25.000.000	25.000.000		L	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sum-ber Dana Lain-nya	Total		SKPD Penang-gung Jawab	Jenis Kegiat-an	Kate-gori Kegiat-an
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
	2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	51.000.000				51.000.000	51.000.000		L	
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia	4 dokumen	19.937.856.742				19.937.856.742	19.937.856.742			
	2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul					Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	267 orang	19.912.856.742				19.912.856.742	19.912.856.742		L	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sum-ber Dana Lain-nya	Total		SKPD Penang-gung Jawab	Jenis Kegiat-an	Kate-gori Kegiat-an
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi keuangan SKPD			Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul					Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/v erifikasi keuangan	1 dokumen	25.000.000				25.000.000	25.000.000		B	
2.11.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul					Jumlah dokumen Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaa n	1 dokumen									
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD			Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul					Jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1 laporan									

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sum-ber Dana Lain-nya	Total		SKPD Penang-gung Jawab	Jenis Kegiat-an	Kate-gori Kegiat-an
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.2.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Jumlah dokumen administrasi BMD yang tersedia	3 dokumen			197.407.685				197.407.685	210.000.000			
	2.11.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul					Jumlah dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	187.407.685				187.407.685	200.000.000		L	
	2.11.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah		Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul					Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah	1 laporan	10.000.000				10.000.000	10.000.000		B	
	2.11.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah		Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul					Jumlah laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1 laporan								B	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sum-ber Dana Lain-nya	Total		SKPD Penang-gung Jawab	Jenis Kegiat-an	Kate-gori Kegiat-an
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.11.01.2.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah							Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang tersedia	2 dokumen			288.700.000				288.700.000	313.700.000			
2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut/Kelengkapannya			Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut / Kelengkapannya				Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut/Keengkapannya	326 paket	213.700.000				213.700.000	213.700.000		L	
2.11.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				Tarogong Kidul	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	75.000.000				75.000.000	100.000.000		B	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sum-ber Dana Lain-nya	Total		SKPD Penang-gung Jawab	Jenis Kegiat-an	Kategori Kegiat-an
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.2.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Jumlah dokumen administrasi umum yang tersedia	6 dokumen			474.957.200				474.957.200	553.161.800			
	2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul					Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	10.000.000				10.000.000	35.000.000		L	
	2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul					Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	140.000.000				140.000.000	198.161.800		L	
	2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul					Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan	2 paket	90.000.000				90.000.000	90.000.000		L	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sum-ber Dana Lain-nya	Total		SKPD Penang-gung Jawab	Jenis Kegiat-an	Kate-gori Kegiat-an
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul					Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	9.956.700				9.956.700			L	
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul					Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	75.000.000				75.000.000	80.000.000		L	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul					Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	150.000.500				150.000.500	150.000.000		L	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sum-ber Dana Lain-nya	Total		SKPD Penang gung Jawab	Jenis Kegiat an	Kate gori Kegiat an
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah yang tersedia	4 dokumen			2.244.433.300				2.244.433.300	-			
2.11.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul					Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 unit	341.764.100				341.764.100			B	
2.11.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul					Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	10 unit					-			B	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sum-ber Dana Lain-nya	Total		SKPD Penang-gung Jawab	Jenis Kegiat-an	Kate-gori Kegiat-an
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul					Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	9 Unit	252.669.200								
	2.11.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul					Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	1.650.000.000				1.650.000.000			B	
	2.11.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul					Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit					-			B	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sum-ber Dana Lain-nya	Total		SKPD Penang-gung Jawab	Jenis Kegiat-an	Kate-gori Kegiat-an
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Jumlah dokumen penyedia-an jasa penunjan-g yang tersedia	2 dokumen			279.900.650				279.900.650	99.993.900			
	2.11.01.2.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul					Jumlah laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 laporan	99.993.900				99.993.900	99.993.900			
	2.11.01.2.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul					Jumlah laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 laporan	179.906.750				179.906.750				
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Jumlah dokumen pemeliha-raan BMD penunjan-g urusan yang tersedia	2 dokumen			450.810.000				450.810.000	100.000.000			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sum-ber Dana Lain-nya	Total		SKPD Penang-gung Jawab	Jenis Kegiat-an	Kategori Kegiat-an
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul					Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	22 unit kendaraan	200.810.000				200.810.000	100.000.000		L	
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kel. Sukagalih (DLH)	Tarogong Kidul					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 gedung	250.000.000				250.000.000			L	
																-				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sum-ber Dana Lain-nya	Total		SKPD Penang-gung Jawab	Jenis Kegiat-an	Kate-gori Kegiat-an
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2.11.02					Persen-tase dokum-en lingku-ngan yang dievalu-asi	100%					3.550.000.000				3.550.000.000	3.000.000.000			
	2.11.02.2.01					Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen RPPLH dan Penduku-ngnya yang disusun	2 Dokumen		400.000.000	-	-	-	400.000.000	250.000.000			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sum-ber Dana Lain-nya	Total		SKPD Penang gung Jawab	Jenis Kegiat an	Kate gori Kegiat an
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.02.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota				Kabupaten Garut					Jumlah dokumen RPPLH dan pendukung nya yang disusun dan jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/ Kota yang disusun	2 dokumen	400.000.000				400.000.000	250.000.000		L	
	2.11.02.2.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota									Jumlah dokumen pengendalian dan pelaksanaan RPPLH yang disusun	1 dokumen						-			
																-				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sum-ber Dana Lain-nya	Total		SKPD Penang-gung Jawab	Jenis Kegiat-an	Kate-gori Kegiat-an
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.11.02.2.02	Penyeleng-garan Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota							Jumlah KLHS yang disusun	7	Dokumen		3.150.000.000				3.150.000.000	2.750.000.000			
2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang				Menyesuaik-an dengan Prioritas PUPR	Jumlah KLHS Tata Ruang yang disusu-n				Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kab/Kota yang Disusun	7	Dokumen	3.150.000.000			3.150.000.000	2.750.000.000		L	
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJM D					Jumlah KLHS RPJMD yang disusu-n				Jumlah Dokumen Pembuatan dan Pelaksanaa-n KLHS RPJPD/RPJ MD yang Disusun	1	dokumen	-							

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sum-ber Dana Lain-nya	Total		SKPD Penang gung Jawab	Jenis Kegiat an	Kate gori Kegiat an
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.02 2.02.03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup				Jumlah KLHS yang disusun				Jumlah dokumen Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang disusun	1 dokumen	-								
3	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,80 poin					6.960.000.000	4.500.000.000	18.329.200.000	-	29.789.200.000	17.410.000.000			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sum-ber Dana Lain-nya	Total		SKPD Penang-gung Jawab	Jenis Kegiat-an	Kate-gori Kegiat-an
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.03.2.01.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							Jumlah dokumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1 dokumen			2.210.000.000	1.000.000.000	1.900.000.000	-	5.110.000.000	5.110.000.000			
	2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				Kab Garut					Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media air, udara, dan laut	1 dokumen	910.000.000		1.400.000.000		2.310.000.000	2.450.000.000		L	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sum-ber Dana Lain-nya	Total		SKPD Penang-gung Jawab	Jenis Kegiat-an	Kate-gori Kegiat-an
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim			Sukanegla, Rancasalak, Padawaaas, Sukalilah, Cipaganti	Garut Kota, Kadungora, Pasirwangi, Sukaresmi, Cisurupan					Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	1 dokumen	850.000.000				850.000.000	660.000.000		L	
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				Kab Garut					Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	1 dokumen	450.000.000	1.000.000.000	500000000		1.950.000.000	2.000.000.000		L	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sum-ber Dana Lain-nya	Total		SKPD Penang-gung Jawab	Jenis Kegiat-an	Kate-gori Kegiat-an
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.0 3.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						Jumlah dokumen Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/kota	3 dokumen			250.000.000	-	-	-	250.000.000	300.000.000			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sum-ber Dana Lain-nya	Total		SKPD Penang-gung Jawab	Jenis Kegiat-an	Kategori Kegiat-an
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat				Kab Garut					Jumlah laporan sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan	1 laporan	125.000.000				125.000.000	150.000.000		B	
2.11.03.2.02.02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				Kab Garut					Jumlah lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang diisolasi	1 lokasi	125.000.000				125.000.000	150.000.000		B	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sum-ber Dana Lain-nya	Total		SKPD Penang-gung Jawab	Jenis Kegiat-an	Kate-gori Kegiat-an
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.03 2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			Kab Garut					Jumlah lokasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan	1 lokasi								B	
																-				
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						Jumlah dokumen pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	3 dokumen			4.500.000.000	3.500.000.000	16.429.200.000		24.429.200.000	12.000.000.000			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sum-ber Dana Lain-nya	Total		SKPD Penang-gung Jawab	Jenis Kegiat-an	Kate-gori Kegiat-an
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.11.03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar				Kab Garut					Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar	1 Dokumen					-				
2.11.03.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar				Kab Garut					Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar	1 Dokumen	1.500.000.000	500.000.000	12.429.200.000		14.429.200.000	1.750.000.000		B	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sum-ber Dana Lain-nya	Total		SKPD Penang gung Jawab	Jenis Kegiat an	Kate gori Kegiat an
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi			Sukaraja, Samarang, Tanjung Karya, Cisarua, Karyamekar, Padawaas, Barusari, Leles, Canguang, Margaluyu, Cikembulan, Tanggulun, Talagasari, Cibatu, Kersamahan, Cisu, Mekarwangi, Cintamanik, Cinta, Sindanggali, Ciela, Sukasenang, Cinisti, Cilawu, Pasanggrahan, Mekarmukti, Dangiang, Sukamurni, Sukawangi, Tambakbaya, Pangauban, Simpang,	Kecamatan Banyuresmi, Kecamatan Samarang, Kecamatan Pasirwangi, Kecamatan Leles, Kecamatan Kadungora, Kecamatan Cibatu, Kecamatan Kersamahan, Kecamatan Malangbong, Kecamatan Sukawening, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Bayongbong, Kecamatan Cilawu, Kecamatan Cisarupan, Kecamatan Cikajang,					Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1 Dokumen	3.000.000.000	3.000.000.000	4.000.000.000		10.000.000.000	10.250.000.000			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sum-ber Dana Lain-nya	Total		SKPD Penang gung Jawab	Jenis Kegiat an	Kate gori Kegiat an
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Banjarwangi, Padahurip, Dangiari, Singajaya, Ciudian, Sukawangi, Pancasura, Cigintung, Saribakti, Pangrumasan, Cisompet, Sukanagara, Cikelet, Lingamank, Cigadog, Pamalayan, Awassagara, Margalaksana, Sinarjaya, Cihikeu, Hegarmanan, Karangwangi, Cijayana, Mekarsari, Neglasari,	Kecamatan Banjarwangi, Kecamatan Singajaya, Kecamatan Peundeuy, Kecamatan Cisompet, Kecamatan Cikelet, Kecamatan Bungbulang, Kecamatan Mekarmukti, Kecamatan Pakenjeng,															

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sumber Dana Lainnya	Total		SKPD Penanggung Jawab	Jenis Kegiatan	Kategori Kegiatan
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Pakenjeng, Garumukti, Panawa, Pananjung, Linggarjati, Nyalindung, Karangsewu, Mekarsewu, Caringin, , Sukamulya, Mekarmukti, Sukalaksana, Selaawi, Cigawir, Cihuni, Tegalpanjang	Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Cisewu, Kecamatan Caringin, Kecamatan Talegong, Kecamatan Selaawi, Kecamatan Pangatikan, Kecamatan Sucinaraja.															

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sumber Dana Lainnya	Total		SKPD Penanggung Jawab	Jenis Kegiatan	Kategori Kegiatan
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					Persentase luas ruang terbuka hijau yang dikelola (taman, hutan kota)	0,144%					13.530.000.000				13.530.000.000	13.530.000.000			
	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota							Jumlah lokasi kegiatan pengelolaan ruang terbuka hijau	32 lokasi			13.530.000.000				13.530.000.000	13.530.000.000			
	2.11.04.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				Kab. Garut					Jumlah dokumen Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1 dokumen					-			B	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sum-ber Dana Lain-nya	Total		SKPD Penang-gung Jawab	Jenis Kegiat-an	Kate-gori Kegiat-an
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan				Karangpawitan, Cilawu, Banyuresmi					Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	10 Ha	7.700.000.000				7.700.000.000	7.700.000.000		B	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Perkotaan Garut					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	7,89 Ha	5.500.000.000				5.500.000.000	5.500.000.000		L	
2.11.04.2.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya				Perkotaan Garut					Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	4 Ha	220.000.000				220.000.000	220.000.000		B	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sum-ber Dana Lain-nya	Total		SKPD Penang gung Jawab	Jenis Kegiat an	Kate gori Kegiat an
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.04.2.01.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			Perkotaan Garut					Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	30 orang	110.000.000				110.000.000	110.000.000		B	
	2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati								Jumlah lokasi untuk melengkapi sarana dan prasarana Taman Kehati	1 lokasi									
5	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				Persentase pelaporan pengendalian B3 dan LB3	100%					350.000.000				350.000.000	700.000.000			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sumber Dana Lainnya	Total		SKPD Penanggung Jawab	Jenis Kegiatan	Kategori Kegiatan
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.0 5.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3							Jumlah laporan data Penyimpanan Sementara a limbah B3 pelaku usaha dan/atau kegiatan	1 laporan			150.000.000	-	-	-	150.000.000	325.000.000		B	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sum-ber Dana Lain-nya	Total		SKPD Penang gung Jawab	Jenis Kegiat an	Kate gori Kegiat an
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.11.05 2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				Kab Garut					Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 dokumen	150.000.000				150.000.000	175.000.000		B	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sum-ber Dana Lain-nya	Total		SKPD Penang-gung Jawab	Jenis Kegiat-an	Kate-gori Kegiat-an
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.05 2.01.0 2 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3				Kab Garut					Jumlah laporan kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	12 laporan					-	150.000.000		B	
	2.11.0 5.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Jumlah dokumen pengumpulan Limbah B3	2 dokumen					200.000.000				200.000.000	375.000.000			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sum-ber Dana Lain-nya	Total		SKPD Penang gung Jawab	Jenis Kegiat an	Kate gori Kegiat an
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.11.05 2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				Kab Garut					Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 dokumen	200.000.000				200.000.000	225.000.000			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sum-ber Dana Lain-nya	Total		SKPD Penang gung Jawab	Jenis Kegiat an	Kate gori Kegiat an
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.05 .2.02.0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan								Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang bukan menjadi kewenangan Pemda Kabupaten/ Kota serta pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan	1 dokumen					-	150.000.000		B	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sumber Dana Lainnya	Total		SKPD Penanggung Jawab	Jenis Kegiatan	Kategori Kegiatan
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										kewenangannya										
6	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan PPLH	5 Dokumen					725.000.000				725.000.000	825.000.000			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sum-ber Dana Lain-nya	Total		SKPD Penang-gung Jawab	Jenis Kegiat-an	Kate-gori Kegiat-an
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.06 6.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan	5 Dokumen			725.000.000				725.000.000	825.000.000			
	2.11.06 2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				Kabupaten Garut					Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	2 dokumen	400.000.000				400.000.000	500.000.000		B	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sum-ber Dana Lain-nya	Total		SKPD Penang gung Jawab	Jenis Kegiat an	Kate gori Kegiat an
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.11.06.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup				Luar Kabupaten Garut					Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	4 surat rekomendasi	50.000.000				50.000.000	50.000.000		B	
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				Kabupaten Garut					Jumlah dokumen Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	200.000.000				200.000.000	200.000.000		L	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sum-ber Dana Lain-nya	Total		SKPD Penang gung Jawab	Jenis Kegiat an	Kate gori Kegiat an
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.06 2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan dan penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH			Kabupaten Garut					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	1 dokumen	75.000.000				75.000.000	75.000.000		B	
7	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAA N MASYARAKA T HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				Jumla h status masyar akat hukum adat di kabupa ten/ko ta	3 lokasi				3 lokasi	440.000.000				440.000.000	440.000.000			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sum-ber Dana Lain-nya	Total		SKPD Penang gung Jawab	Jenis Kegiat an	Kate gori Kegiat an
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.0 7.2.01							Jumlah lokasi Masyarakat at Hukum Adat dan Kearifan Lokal yang diakui	1 lokasi			220.000.000				220.000.000	220.000.000			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sum-ber Dana Lain-nya	Total		SKPD Penang-gung Jawab	Jenis Kegiat-an	Kategori Kegiat-an
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.11.07.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH				Kab. Garut					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1 dokumen	220.000.000				220.000.000	220.000.000		B	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sum-ber Dana Lain-nya	Total		SKPD Penang-gung Jawab	Jenis Kegiat-an	Kategori Kegiat-an
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.07.2.02							Jumlah lokasi Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal yang terbina	1 Dokumen			220.000.000				220.000.000	220.000.000			
2.11.07.2.02.01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH				Leles	Jumlah lokasi Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal yang diberdayakan				Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1 Dokumen	220.000.000				220.000.000	220.000.000		B	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sum-ber Dana Lain-nya	Total		SKPD Penang-gung Jawab	Jenis Kegiat-an	Kate-gori Kegiat-an
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
8	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				Persentase kelurahan/desa berbudaya lingkungan	25%					660.000.000				660.000.000	660.000.000			
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	5 kecamatan			660.000.000				660.000.000	660.000.000			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sum-ber Dana Lain-nya	Total		SKPD Penang gung Jawab	Jenis Kegiat an	Kate gori Kegiat an
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat				Kab. Garut					Jumlah Lembaga/ke lompok Masyarakat /Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi nya Terkait PPLH	5 Lembaga	220.000.000				220.000.000	220.000.000		B	
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup				Kab. Garut					Jumlah Pendamping an Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	5 Dokumen	220.000.000				220.000.000	220.000.000		B	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sum-ber Dana Lain-nya	Total		SKPD Penang-gung Jawab	Jenis Kegiat-an	Kategori Kegiat-an
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup			Kab. Garut					Jumlah Masyarakat /Kelompok Masyarakat /Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	100 Orang	220.000.000				220.000.000	220.000.000		B	
9	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				Persentase peningkatan kemitraan lingkungan	20%					550.000.000				550.000.000	550.000.000			
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten		1 kegiatan				550.000.000				550.000.000	550.000.000			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sum-ber Dana Lain-nya	Total		SKPD Penang gung Jawab	Jenis Kegiat an	Kate gori Kegiat an
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.09 2.01.0 1	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			Kab. Garut					Jumlah Masyarakat /Lembaga Masyarakat /Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	10 Entitas	550.000.000				550.000.000	550.000.000		L	
10	2.11.1 0	PROGRAM PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				Persen tase penyel esaian kasus lingku ngan hidup	100%					150.000.000				300.000.000	350.000.000			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sum-ber Dana Lain-nya	Total		SKPD Penang-gung Jawab	Jenis Kegiat-an	Kate-gori Kegiat-an
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.11.10.2.01.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota							Jumlah laporan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	2 laporan			150.000.000				300.000.000	350.000.000			
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota				Kab Garut					Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	1 dokumen	150.000.000				150.000.000	175.000.000		L	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sum-ber Dana Lain-nya	Total		SKPD Penang gung Jawab	Jenis Kegiat an	Kate gori Kegiat an
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan			Kab Garut					Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	1 dokumen					150.000.000	175.000.000		B	
11	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				Tingkat Pengelolaan Sampah	35%					72.400.000.000	11.000.000.000	6.600.000.000		90.000.000.000	101.650.000.000			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sum-ber Dana Lain-nya	Total		SKPD Penang gung Jawab	Jenis Kegiat an	Kate gori Kegiat an
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.11 1.2.01	Pengelolaan Sampah						Tingkat Pengelolaan Sampah	35%			72.400.000.000	11.000.000.000	6.600.000.000		90.000.000.000	101.650.000.000			
	2.11.11 2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota			Kabupaten Garut					Jumlah dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota yang disusun	1 dokumen								B	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sum-ber Dana Lain-nya	Total		SKPD Penang-gung Jawab	Jenis Kegiat-an	Kategori Kegiat-an
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaوران Ulang dan Pemanfaatan Kembali			Kota Kulon, Kota Wetan, Desa Pakuwon, Desa Ciwalen, Desa Paminggir, Desa Leles, Langensari, Desa Sukakarrya, Desa Sukajaya, Desa Haurpanggung, Desa Mekarsari, Desa Bagendit, Desa Pandawaas, Desa Cangkuang, Desa Keresek, Desa Sanding, Desa Panembong, Desa Mulyasari, Desa Pakuon, Desa Cipaganti, Desa Padamukti,	Garut Kota, Tarogong Kaler, Tarogong Kidul, Banyuresmi, Pasirwangi, Leles, Cibatu, Malangbong, Bayongbong, Cisarupan, Sukaresmi, Pameungpeuk, Cisompet, Cibalong, Cikelet, Cisewu, Talegong, Selaawi, Pangatikan, Sucinaraja					Jumlah laporan hasil Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaوران Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1 laporan	6.800.000.000	1.000.000.000	1.200.000.000	-	9.000.000.000	10.000.000.000		L	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sum-ber Dana Lain-nya	Total		SKPD Penang-gung Jawab	Jenis Kegiat-an	Kate-gori Kegiat-an
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Desa Mancagahar, Desa Neglasari, Desa Karyaukti, Desa Sagara, Desa Cijambe, Desa Pamalayan, Desa Mekarmulya, Desa Selaawi, Desa Saamida, Desa Babakan Loa, Desa Tegalpanjang																

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sum-ber Dana Lain-nya	Total		SKPD Penang-gung Jawab	Jenis Kegiat-an	Kate-gori Kegiat-an
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			Sukaraja	Banyuwangi					Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, dolah, diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	73000 ton	10.000.000.000	10.000.000.000	5.400.000.000	-	25.400.000.000	26.000.000.000		L	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sum-ber Dana Lain-nya	Total		SKPD Penang-gung Jawab	Jenis Kegiat-an	Kate-gori Kegiat-an
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				Garut Kota, Tarogong Kaler, Tarogong Kidul, Banyuresmi					Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak mlainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	1 kelompok	600.000.000	-	-	-	600.000.000	650.000.000		L	
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan				Kabupaten Garut					Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun pihak lain di	1 dokumen	30.000.000.000			-	30.000.000.000	35.000.000.000		L	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sum-ber Dana Lain-nya	Total		SKPD Penang-gung Jawab	Jenis Kegiat-an	Kate-gori Kegiat-an
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										luar kabupaten/kota untuk pengelolaan sampah Kabupaten/Kota, pengelolaan persampahan sesuai dengan rencana induk peneglolan sampah dan mengacu kepada jakstrada										
2.11.11.2.01.06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan				Kabupaten Garut					Jumlah dokumen Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 dokumen	-	-	-	-	-			B	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Perkiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
				Desa / Kelurahan	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/PHLN	Sum-ber Dana Lain-nya	Total		SKPD Penang gung Jawab	Jenis Kegiat an	Kate gori Kegiat an
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				Banyuwangi, Cibalong/Pameungpeuk, Caringin, Malangbong					Jumlah Sarana dan Prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, penagngkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	97 unit	25.000.000.000				25.000.000.000	30.000.000.000		L	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 – 2024 dan menjadi acuan agar tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut telah menetapkan beberapa gerakan besar, antara lain:

1. **GERAKAN GARUT LENING**
Melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
2. **GERAKAN HEJO NGEMPLOH WALUNGAN BERSIH**
Melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penghijauan dan penataan hukum lingkungan
3. **GERAKAN TALITI GILIR (TATA LINGKUNGAN TI GIRANG KA HILIR)**
Melalui peningkatan kualitas dan kuantitas dokumen lingkungan yang terintegrasi untuk keselamatan bersama
4. **GERAKAN NATA MAHKOTA**
Melalui pengembangan dan pembangunan taman keanekaragaman hayati dan konservasi lingkungan.
5. **GERAKAN TPA “SARAGA”**
Melalui pembangunan TPA dengan pengelolaan sampah yang syarat edukasi, teknologi, bernilai tambah dan indah.
6. **GERAKAN SI LABU UKUR**
Melalui pembangunan laboratorium dan akreditasi laboratorium untuk pengukuran kualitas lingkungan.

Akhir kata semoga Allah SWT meridhoi dan memberikan kekuatan pada kita untuk dapat melaksanakan Rencana Kerja ini. Aamiin.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN